



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI DENGAN  
KEPALA DAN ANGGOTA KOMITE BPH MIGAS**

---

Tahun Sidang	: 2014 -2015
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala dan Anggota Komite BPH Migas
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 19 November 2014
Pukul	: 10.00 WIB s.d 14.10 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Ketua	: Dr. Ir. H. Kardaya Warnika, DEA
Sekretaris	: Dr. Dewi Barliana Soetisna, M.Psi
Hadir Anggota	: 20 dari 50 Anggota Komisi VII DPR-RI orang izin
Hadir Pemerintah	: Kepala dan Anggota Komite BPH Migas, beserta jajarannya.
Acara	: "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan". Status Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak.

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Rabu, tanggal 19 November 2014 dibuka pukul 10.40 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Dr. Ir. H. Kardaya Warnika, DEA, mengingat jumlah Anggota yang hadir belum mencapai kourum maka rapat Dengar Pendapat diskors selama 10 menit. Skors dicabut mengingat jumlah Anggota Komisi VII DPR RI telah mencapai kuorum dan rapat dibuka kembali pada pukul 10.50 WIB dan terbuka untuk umum.
2. Sebelum memasuki materi pembahasan Anggota Komisi VII DPR RI memperkenalkan diri dan daerah pemilihannya masing-masing dan dilanjutkan dengan perkenalan di jajaran BPH Migas.
3. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala dan Anggota Komite BPH Migas terkait pokok bahasan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan, Status Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak.
4. Di dalam pembahasan materi Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala dan Anggota Komite BPH Migas, pimpinan rapat dilanjutkan oleh Ir. H. Mulyadi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi VII DPR RI mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan upaya maksimal agar realisasi distribusi BBM Bersubsidi sampai akhir Tahun 2014 tidak melampaui kuota yang telah ditetapkan.
2. Komisi VII DPR RI mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk menyampaikan fakta dan data tentang harga pokok penjualan tiap jenis bahan bakar minyak bersubsidi.
3. Komisi VII DPR RI mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan kajian tentang eksistensi dan organisasi BPH Migas termasuk tentang perlunya perwakilan BPH Migas di daerah, terutama pada daerah yang banyak terjadi penyalahgunaan BBM Bersubsidi.
4. Komisi VII DPR RI mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan pengkajian dan memberikan rekomendasi tentang tumpang tindih kelembagaan dan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang menghambat kinerja BPH Migas.
5. Komisi VII meminta BPH Migas untuk menyampaikan data-data penyalahgunaan BBM bersubsidi termasuk oknum mafia migas yang oleh pemerintah disebut memiliki kekayaan 1,4 T kepada Komisi VII DPR RI paling lambat hari Senin tanggal 24 November 2014.

## III. PENUTUP

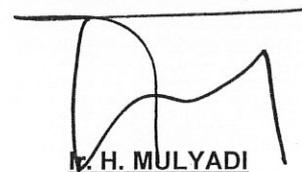
Rapat ditutup Pukul 14.10 WIB

KEPALA BPH MIGAS



Dr. Ir. ANDY NOORSAMAN SOMMENG, DEA

Jakarta, 19 November 2014  
PIMPINAN KOMISI VII DPR RI  
WAKIL KETUA,

  
H. MULYADI